

DAFTAR REFERENSI

- Arens, Alvin A., Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley. 2012. *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Edisi ke-14. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Bologna, G. Jack, dan Robert J. Lindquist. 1995. *Fraud Auditing and Forensic Accounting: New Tools and Techniques*. Edisi ke-2. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Firdaus, Ervin Septian. 2009. “*Evaluasi atas Pelaksanaan Audit Investigasi pada Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan*”. Skripsi. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta.
- Kepala BPKP. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi.
- _____. Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- _____. Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua Barat.
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Nugraha, Guruh Panca. 2006. “*Evaluasi atas Pelaksanaan Proses Audit Investigatif oleh Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan*”. Skripsi. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- _____. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

____. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

____. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

____. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sastra, Cipta Dwi. 2010. “*Evaluasi atas Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)*”. Skripsi. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta.

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi ke-4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Singleton, Tommie W., dan Aaron J. Singleton. 2010. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. Edisi ke-4. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.

Suryabrata, Sumadi. 2014. *Metodologi Penelitian*. Cetakan ke-25. Jakarta: Rajawali Pers.

Tuanakotta, M. Theodorus. 2014. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Edisi ke-2. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Wells, Joseph T. 2014. *Principles of Fraud Examination*. Edisi ke-4. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.

